



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Selasa, 03 Agustus 2016

Jaksa Periksa Kepala BPMPD SBT Terkait Korupsi ADD

Ambon - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Jafar Kwairumaratu, Selasa (2/8) diperiksa penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser.

Kwairumaratu dicecar dengan 20 pertanyaan dari tim penyidik. Pemeriksaan Kwairumaratu sebagai saksi atas para tersangka raja maupun kepala Desa (kades) kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015.

Selama pemeriksaan berlangsung sejak pukul 12.00- pukul 16.00 WIT, dipusatkan di aula Kantor Kejati Maluku. Kwairumaratu dicecar dengan pertanyaan berkaitan dengan evaluasi pekerjaan yang dialokasikan dengan dana desa. Hasil pemeriksaan tersebut akan dijadikan sebagai tambahan keterangan yang sudah dituangkan dalam BAP guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Selain Kwairumaratu, dua pejabat SBT lainnya yang ikut diperiksa yakni Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Ali Tomagola dan Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPPKAD SBT, Anita Vanath yang sebelumnya sudah diperiksa Senin (1/8).

Pemeriksaan terhadap Tomagola dan Vanath ini masih seputar mekanisme pencairan anggaran ADD dan kelanjutannya sesuai dengan kebutuhan tahap penyidikan. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser, Ruslan Marasabessy menjelaskan, pemeriksaan dilakukan terhadap tiga saksi untuk kepentingan penyidikan atas sejumlah tersangka korupsi ADD yang sudah dilakukan penahanan.

Menurut Marasabessy, dari pemeriksaan ketiga saksi ini untuk sementara dirasakan cukup sambil penyidik merampungkan berkas para tersangka.

"Tadi (kemarin-red) ada tiga saksi yang kita periksa. Dua saksi lanjutan kemarin sedangkan satunya kepala badan pemberdayaan itu baru diperiksa tadi (kemarin-red). Pemeriksaan untuk sementara sudah selesai. Dan setelah ini kita rampungkan berkas para tersangka," jelasnya.

Dalam kasus ini, sebelumnya Raja Negeri Kilwaru, Kecamatan Seram Timur, M Saleh Kilian mengembalikan uang Rp 100 juta, Senin (25/7) kepada jaksa. Uang Rp 100 juta yang dikembalikan merupakan kerugian negara dari jumlah anggaran ADD sebesar Rp 318.600. 000. Dari empat tersangka yang ditahan pada Selasa (19/7) lalu, hanya Saleh Kilian yang mengembalikan kerugian negara.

Empat kepala desa yang ditahan penyidik itu, adalah Raja Afan Kota, Kecamatan Kelmury M Aswir Kwairumaratu alias MAK, M Saleh Kilian Raja Negeri Kilwaru



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Kecamatan Seram Timur, Raja Kian Darat, Kecamatan Kian Darat Abdul Rajak Aktafela alias ARA dan Kepala Desa Rarat Kecamatan Gorom Timur Irfan Gia Kelerey.

Untuk diketahui, ADD tahun 2015 senilai Rp 250 juta hingga Rp 300 juta yang diperuntukan bagi seluruh desa di Kabupaten SBT tidak digunakan sesuai peruntukannya.

Sebelumnya jaksa sudah menahan Kepala Desa Administratif Undur Saifut Gazat sejak Kamis 19 Mei dan bendaharanya, Sam Keilosan diberi tahanan kota sejak 26 Mei 2016. **(S-27)**